



LAPORAN REALISASI KINERJA TRIWULAN III

2025



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Brigjen Katamso No. 2 Palangka Raya - Kalimantan Tengah 73112

Telp. (0536) 3220517/ 3229663

Website : www.dislutkan.kalteng.go.id

Email : dislutkan@kalteng.go.id

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-NYA penyusunan **“Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan III Tahun 2025”** ini dapat diselesaikan pada waktunya. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Triwulan III ini secara umum merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan strategi pembangunan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah yang mengarah pada prinsip-prinsip *good governance* sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan III Tahun 2025 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja yang telah dicapai serta mampu mengawal upaya pencapaian kinerja secara bertahap dan terstruktur di bidang kelautan dan perikanan.

Sangat disadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan III Tahun 2025 ini belum sempurna, namun setidaknya dapat memberikan manfaat dan gambaran tentang hasil pencapaian kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah.

Palangka Raya, Oktober 2025

Kepala Dinas,



SRI WIDANARNI, S.I.P., M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 196902121989112001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
 BAB I KINERJA	 1
1.1 Pengukuran Capaian Kinerja	1
1.2 Metode Pengukuran Kinerja	1
1.3 Hasil Pengukuran Kinerja	2
BAB II PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT	4
2.1 Kendala dan Permasalahan	4
2.2 Tindak Lanjut Penyelesaian	4
BAB III PENUTUP	5
 LAMPIRAN	
1. Realisasi Kinerja	
2. Realisasi Keuangan	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Realisasi Kinerja
- Lampiran 2 : Realisasi Keuangan

Bab I

Kinerja

1.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan. Dalam mengukur kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah, telah diidentifikasi berbagai komponen indikator, dimana dalam kegiatan-kegiatan Tahun 2025 sebagian besar indikatornya meliputi tiga jenis indikator kinerja yaitu input, output, dan outcome. Pencapaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah dalam Tahun 2025 merupakan kemampuan perencanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan maupun rutin.

1.2 Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut :

- ✓ Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- ✓ Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcome* atau minimal *output* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Untuk memudahkan interpretasi atas pencapaian kinerja sasaran dipergunakan interval nilai sebagai berikut :

No.	Kategori	Rentang Nilai	Kode
1.	Sangat Baik	>100	Biru
2.	Baik	80-100	Hijau
3.	Cukup	50-79	Kuning
4.	Kurang	<49	Merah

1.3 Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematis yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja berupa indikator keluaran dan hasil (*outcome*).

Pengukuran kinerja yang dilakukan mencakup tingkat pencapaian sasaran merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan, sebagaimana telah dituangkan dalam Penetapan Kinerja. Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir pengukuran kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan pendekatan di atas, tingkat pencapaian kinerja sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 pada posisi Triwulan III adalah seperti pada Tabel berikut ini :

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2025 TRIWULAN III
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Sasaran	No	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Target Capaian Triwulan III			Kategori
					Target	Realisasi	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Misi 1: Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan								
Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Industri Pengolahan	1	Produksi Perikanan Tangkap	145.481,98	Ton/ tahun	72.740,99	117.872,78	162,04	Sangat Baik
	2	Nilai Tukar Nelayan	112,00	NTN/ NTBi	100,00	97,96	97,96	Baik
	3	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	152.405.21	Ton/ tahun	76.202,61	98.193,64	128,86	Sangat Baik
	4	Jumlah Produksi Benih	76.390,00	Ribu Ekor/ tahun	38.195,00	39.770,00	104,12	Sangat Baik
	5	Angka Konsumsi	61,23	Kg/ Kap/ tahun	30,62	62,20	203,14	Sangat Baik
	6	Jumlah Volume Produk Olahan Hasil Perikanan	35.697,36	Ton/ tahun	17.848,68	32.258,60	180,73	Sangat Baik
	7	Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	3,50	%	2,00	2,09	104,50	Sangat Baik
	8	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir	6	Lokasi	3	8	266,67	Sangat Baik
	9	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku	90	%	85	85	100,00	Baik
	10	Jumlah POKMASWAS yang berperan dalam Kegiatan Pengawasan SDKP	58	Kelompok	29	49	168,97	Sangat Baik
	11	Nilai SAKIP	B	Predikat	B	B	100,00	Baik
	12	Jumlah Informasi Publik yang Disediakan oleh PPID	37	Naskah	27	64	237,04	Sangat Baik

Keterangan :

* : merupakan angka sementara Triwulan III dari kabupaten dan kota (belum validasi)

Bab II

Permasalahan dan Tindak Lanjut

2.1 Kendala dan Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja selama Triwulan III, sampai dengan akhir bulan September 2025 yaitu :

- a. Terkait kebijakan pengelolaan data dan informasi untuk kelautan dan perikanan yang terintegrasi di pusat seperti data jumlah produksi perikanan tangkap, data jumlah produksi perikanan budidaya dan jumlah produksi benih, dan angka konsumsi ikan sehingga Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah harus menunggu data tersebut divalidasi terlebih dahulu oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, sedangkan untuk data angka konsumsi ikan baru bisa ditampilkan berdasarkan data hasil Survey Susenas pada akhir tahun 2024.
- b. Terkait data-data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah, capaian dapat dianalisa setelah data tersebut dipublikasi oleh BPS.

2.2 Tindak Lanjut Penyelesaian

Tindak lanjut penyelesaian permasalahan sebagaimana yang telah teridentifikasi pada bagian di atas yaitu :

- a. Mulai tahun 2018 merupakan masa peralihan menuju masa *One Data*, oleh karena itu sangat penting untuk mencermati posisi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalteng dalam mendukung hal tersebut dan mengambil posisi aktif, sehingga diharapkan pada Tahun 2025 operasional *One Data* dapat berjalan dengan lancar termasuk fasilitasi enumerator daerah.
- b. Data verifikasi POKMASWAS Kalteng masih belum semua lengkap, seandainya data sudah terverifikasi dari Kabupaten/Kota sehingga pembinaan bisa fokus pada POKMASWAS yang aktif dan terverifikasi. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya akan melakukan sistem jemput bola ke lapangan langsung dan berkoordinasi via phone untuk percepatan verifikasi data POKMASWAS.
- c. Sasaran pengawasan Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku kepada, Nelayan yang mempunyai kapal dengan surat ijin, Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan Pembudidaya ikan.

Bab III

Penutup

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah secara formal merupakan media pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi. Media pertanggung jawaban ini ditujukan kepada pemberi amanah atau pihak yang memberikan delegasi wewenang dan untuk menjawab berbagai permasalahan yang diminta oleh pihak-pihak yang terkait (*stakeholder*). Pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah secara Triwulan ini juga diharapkan akan mampu mengawal upaya pencapaian kinerja secara bertahap dan terstruktur.

Dengan demikian disamping Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai media pertanggung jawaban pelaksanaan misi organisasi juga merupakan proses mengevaluasi diri sendiri sehingga akan bermanfaat untuk lebih inovatif dan rasional dalam :

- (a) Melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mengarahkan kepada pencapaian hasil;
- (b) Melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk mengarahkan kegiatan agar terfokus pada sasaran;
- (c) Menentukan perubahan-perubahan yang diperlukan guna memperbaiki keadaan;
- (d) Meningkatkan usaha-usaha agar misi dapat dilaksanakan dengan berhasil;
- (e) Meningkatkan usaha-usaha untuk mencapai tujuan jangka panjang.

Berbagai kendala yang dihadapi diharapkan akan mampu diatasi, khususnya keterlambatan dalam proses pengadaan barang/ jasa, dimana fungsi koordinasi merupakan kunci melakukan percepatan. Selain itu, kendala internal yang dapat diselesaikan secara prioritas dalam waktu yang singkat akan menjadi target yang akan diselesaikan terlebih dahulu sebelum melakukan koordinasi lanjutan dengan pihak di luar dinas.

**PROGRES KEUANGAN DAN FISIK APBD DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PADA TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2025**

KODE	URAIAN	PAGU DANA	PAGU PERUBAHAN	REAL KEUANGAN		REAL FISIK
		Rp.	Rp.	Rp.	%	(%)
1	2	3	4	5	6	7
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN		60.229.063.944	48.504.293.044	16.970.569.506	34,99	36,77
3.25.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	33.230.793.144	33.060.434.394	13.724.631.069	41,51	45,69
3.25.1.101	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.866.800.000	1.652.404.250	450.787.571	27,28	30,89
3.25.1.101.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	643.000.000	497.904.000	128.833.091	25,88	29,38
3.25.1.101.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	43.600.000	23.149.000	21.863.780	94,45	97,95
3.25.1.101.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	17.000.000	8.545.000	8.220.000	96,20	100,00
3.25.1.101.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.000.000	8.206.250	6.490.700	79,09	82,59
3.25.1.101.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	14.900.000	8.216.000	2.935.000	35,72	39,22
3.25.1.101.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	617.000.000	617.000.000	125.000.000	20,26	23,43
3.25.1.101.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	516.300.000	489.384.000	157.445.000	32,17	35,67
3.25.1.102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.072.244.394	19.072.244.394	10.474.995.310	54,92	54,92
3.25.1.102.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	18.079.604.394	18.079.604.394	10.196.195.310	56,40	56,40
3.25.1.102.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	905.400.000	905.400.000	240.700.000	26,58	30,08
3.25.1.102.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	30.240.000	30.240.000	9.640.000	31,88	35,38
3.25.1.102.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.000.000	20.000.000	8.140.000	40,70	44,20
3.25.1.102.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	37.000.000	37.000.000	20.320.000	54,92	-
3.25.1.103	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	243.500.000	172.767.000	114.220.230	66,11	73,78
3.25.1.103.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	17.000.000	17.000.000	13.010.000	76,53	80,03
3.25.1.103.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	60.000.000	60.000.000	6.945.750	11,58	15,08
3.25.1.103.3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	25.000.000	25.000.000	24.520.000	98,08	100,00
3.25.1.103.4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	141.500.000	70.767.000	69.744.480	98,56	100,00
3.25.1.105	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	581.075.000	442.495.000	51.160.000	11,56	24,73
3.25.1.105.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	80.000.000	80.000.000	-	-	-
3.25.1.105.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	143.000.000	143.000.000	-	-	-
3.25.1.105.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	34.075.000	31.495.000	31.495.000	100,00	100,00
3.25.1.105.5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	52.000.000	52.000.000	14.935.000	28,72	31,72
3.25.1.105.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	72.000.000	36.000.000	4.730.000	13,14	16,64
3.25.1.105.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	200.000.000	100.000.000	-	-	-
3.25.1.106	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.453.817.743	4.307.167.743	1.449.335.783	33,65	48,65
3.25.1.106.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.707.600	22.707.600	18.610.300	81,96	85,46
3.25.1.106.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000	20.000.000	2.998.000	14,99	17,99
3.25.1.106.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50.000.000	50.000.000	12.866.000	25,73	29,23
3.25.1.106.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3.123.510.143	3.123.510.143	876.136.800	28,05	31,55
3.25.1.106.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	320.000.000	320.000.000	82.132.338	25,67	29,17
3.25.1.106.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	400.000.000	400.000.000	315.070.000	78,77	82,27
3.25.1.106.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	67.600.000	67.600.000	39.993.000	59,16	62,16
3.25.1.106.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250.000.000	103.350.000	101.529.345	98,24	100,00
3.25.1.106.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	200.000.000	200.000.000	-	-	-
3.25.1.107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.007.500.000	1.007.500.000	-	-	-
3.25.1.107.5	Pengadaan Mebel	7.500.000	7.500.000	-	-	-
3.25.1.107.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.000.000.000	1.000.000.000	-	-	-
3.25.1.108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.574.700.000	2.574.700.000	972.446.396	37,77	46,18
3.25.1.108.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.700.000	6.700.000	6.700.000	100,00	100,00
3.25.1.108.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.000.000.000	1.000.000.000	264.502.719	26,45	29,95
3.25.1.108.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	200.000.000	200.000.000	-	-	-
3.25.1.108.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.368.000.000	1.368.000.000	701.243.677	51,26	54,76
3.25.1.109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.431.156.007	3.831.156.007	211.685.779	5,53	29,19
3.25.1.109.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	460.000.000	460.000.000	199.645.279	43,40	46,90
3.25.1.109.5	Pemeliharaan Mebel	19.985.336	19.985.336	8.624.500	43,15	46,65

3.25.1.109.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	17.325.000	17.325.000	3.416.000	19,72	23,22
3.25.1.109.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.933.845.671	3.333.845.671	-	-	-
3.25.2	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	1.566.430.500	1.289.857.620	126.052.006	9,77	51,09
3.25.2.101	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	1.069.273.000	900.993.370	73.880.840	8,20	14,98
3.25.2.101.2	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	89.800.000	56.095.000	23.600.000	42,07	45,57
3.25.2.101.3	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	148.926.000	103.976.000	10.280.000	9,89	13,39
3.25.2.101.4	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	200.000.000	177.446.000	11.530.000	6,50	10,00
3.25.2.101.5	Penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Dokumen Final RZWP-3	278.469.500	257.148.500	18.720.840	7,28	10,78
3.25.2.101.6	Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir	67.077.500	45.075.370	9.750.000	21,63	25,13
3.25.2.101.9	Penyediaan Data dan Informasi Spasial Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Magrove di luar kawasan hutan	185.000.000	161.252.500	-	-	-
3.25.2.101.13	Pengintegrasian Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3K ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi	100.000.000	100.000.000	-	-	-
3.25.2.102	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	67.157.500	36.578.750	27.339.726	74,74	78,24
3.25.2.102.7	Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	67.157.500	36.578.750	27.339.726	74,74	78,24
3.25.2.103	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	430.000.000	352.285.500	24.831.440	7,05	8,96
3.25.2.103.1	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	250.000.000	227.907.500	24.831.440	10,90	14,40
3.25.2.103.4	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	130.000.000	74.378.000	-	-	-
3.25.2.103.6	Pelaksanaan Fasilitas Akses Kemitraan Usaha	50.000.000	50.000.000	-	-	-
3.25.3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	16.979.264.700	8.345.812.230	1.271.200.153	15,23	28,86
3.25.3.101	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil	2.443.734.500	2.046.921.500	146.725.248	7,17	10,10
3.25.3.101.1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	50.000.000	50.000.000	-	-	-
3.25.3.101.2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	950.000.000	869.161.500	26.395.000	3,04	6,54
3.25.3.101.5	Pengadaan prasarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	150.000.000	130.000.000	5.325.000	4,10	7,60
3.25.3.101.6	Pengelolaan data dan informasi terkait dengan penangkapan ikan terukur	185.000.000	165.425.500	-	-	3,50
3.25.3.101.7	Pengadaan sarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	250.000.000	93.207.500	67.360.248	72,27	75,77
3.25.3.101.8	Penerbitan rekomendasi surat tanda penangkapan ikan andon/ Tanda Daftar Penangkapan Ikan Andon	108.734.500	58.714.500	47.645.000	81,15	84,65
3.25.3.101.10	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	750.000.000	680.412.500	-	-	-
3.25.3.102	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	190.725.000	130.672.500	106.736.500	81,68	98,85
3.25.3.102.1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	150.000.000	110.310.000	87.556.500	79,37	100,00
3.25.3.102.4	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan	40.725.000	20.362.500	19.180.000	94,19	97,69
3.25.3.103	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	125.000.000	65.864.500	31.812.800	48,30	51,80
3.25.3.103.5	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	125.000.000	65.864.500	31.812.800	48,30	51,80
3.25.3.105	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	65.810.000	35.690.000	21.441.200	60,08	63,58
3.25.3.105.3	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT	65.810.000	35.690.000	21.441.200	60,08	63,58
3.25.3.106	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi	14.153.995.200	6.066.663.730	964.484.405	15,90	19,06
3.25.3.106.1	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	10.335.000.000	2.578.992.530	572.221.440	22,19	25,69
3.25.3.106.2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	1.400.000.000	1.322.050.000	216.956.466	16,41	19,91
3.25.3.106.3	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	2.418.995.200	2.165.621.200	175.306.499	8,09	11,59
3.25.4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	4.267.721.600	3.952.740.800	1.478.993.657	37,42	41,23
3.25.4.101	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	50.000.000	28.185.000	20.000.000	70,96	74,46
3.25.4.101.3	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan	50.000.000	28.185.000	20.000.000	70,96	74,46
3.25.4.105	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut	1.502.721.600	1.324.334.800	1.241.326.000	93,73	95,66
3.25.4.105.2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	27.879.800	13.939.900	9.660.000	69,30	73,30
3.25.4.105.4	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1.140.000.000	1.140.000.000	1.122.351.000	98,45	100,00
3.25.4.105.7	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	100.000.000	50.000.000	34.605.000	69,21	72,71
3.25.4.105.11	Pengelola Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	150.000.000	77.974.000	42.135.000	54,04	57,54
3.25.4.105.12	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	84.841.800	42.420.900	32.575.000	76,79	80,29
3.25.4.106	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat	2.715.000.000	2.600.221.000	217.667.657	8,37	10,95

3.25.4.106.3	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.565.000.000	1.496.041.000	203.114.777	13,58	17,08
3.25.4.106.4	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.150.000.000	1.104.180.000	14.552.880	1,32	4,82
3.25.5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	2.830.834.000	879.461.000	160.788.620	18,28	18,20
3.25.5.101	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil	2.830.834.000	879.461.000	160.788.620	18,28	36,40
3.25.5.101.7	Penanganan perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di Wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi	125.000.000	91.930.000	30.792.600	33,50	37,00
3.25.5.101.8	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	102.000.000	450.000.000	-	-	-
3.25.5.101.9	Penanganan perkara sanksi administrasi bidang kelautan dan perikanan izin provinsi	450.000.000	75.000.000	10.500.000	14,00	-
3.25.5.101.13	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai Kewenangan provinsi	33.024.000	16.512.000	13.020.000	78,85	82,35
3.25.5.101.14	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	134.000.000	76.248.000	52.896.020	69,37	72,87
3.25.5.101.16	Pengawasan Usaha Pemanfaatan daya kelautan kewenangan provinsi	100.000.000	63.611.000	8.110.000	12,75	16,25
3.25.5.101.17	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	1.886.810.000	106.160.000	45.470.000	42,83	46,33
3.25.6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.354.020.000	975.987.000	208.904.001	21,40	23,85
3.25.6.102	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	617.080.000	378.925.000	146.044.001	38,54	36,22
3.25.6.102.3	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk di konsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	412.040.000	211.845.000	146.044.001	68,94	72,44
3.25.6.102.4	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Strandar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	205.040.000	167.080.000	-	-	-
3.25.6.103	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	736.940.000	597.062.000	62.860.000	10,53	11,47
3.25.6.103.1	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	400.000.000	360.875.000	7.950.000	2,20	5,70
3.25.6.103.2	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	300.000.000	217.717.000	54.910.000	25,22	28,72
3.25.6.103.4	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku	36.940.000	18.470.000	-	-	-
UPT. PBAPL Kumai (BLUD)		21.163.081.323	21.163.081.323	12.076.486.489	57,06	60,56
3.25.1	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	21.163.081.323	21.163.081.323	12.076.486.489	57,06	60,56
3.25.1.110	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	21.163.081.323	21.163.081.323	12.076.486.489	57,06	60,56
3.25.1.110.1	Peningkatan Pelayanan BLUD	21.163.081.323	21.163.081.323	12.076.486.489	57,06	60,56

A. Realisasi Kinerja

Sasaran	No.	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Target Capaian Triwulan III			Ket
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Misi 1: Mempercepat Pembangunan Ekonomi yang Produktif, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan								
Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Industri Pengolahan	1	Produksi Perikanan Tangkap	145.481,98	Ton/ tahun	72.740,99	117.872,78	162,04	Merupakan Angka Sementara Semester III (Belum Validasi)
	2	Nilai Tukar Nelayan	112,00	NTN/NTBi	100,00	97,96	97,96	Data Diperoleh dari BPS Prov. Kalteng
	3	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	152.405,21	Ton/ tahun	76.202,61	98.193,64	128,86	Merupakan Angka Sementara Semester III (Belum Validasi)
	4	Jumlah Produksi Benih	76.390	Ribu Ekor	38.195,00	39.770,00	104,12	Merupakan Angka Sementara Semester III (Belum Validasi)
	5	Angka Konsumsi	61,23	Kg/ Kap/ tahun	30,62	62,20	203,14	Merupakan Angka Sementara Semester III (Belum Validasi)
	6	Jumlah Volume Produk Olahan Hasil Perikanan	35.697,36	Ton/tahun	17.848,68	32.258,60	180,73	Merupakan Angka Sementara Semester III (Belum Validasi)
	7	Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB	3,50	%	2,00	2,09	104,50	Merupakan Angka Sementara Analisis Data BPS Prov. Kalteng TW. II
	8	Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir	6	Lokasi	3	8	266,67	
	9	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha KP Terhadap Ketentuan dan UU yang berlaku	90	%	85	85	100,00	
	10	Jumlah POKMASWAS yang berperan dalam Kegiatan Pengawasan SDKP	58	Kelompok	29	49	168,97	
	11	Nilai SAKIP	B	Predikat	B	B	100,00	
	12	Jumlah Informasi Publik yang Disediakan oleh PPID	37	Naskah	27	64	237,04	

B. Realisasi Keuangan

KODE REKENING	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU	PAGU PERUBAHAN	REALISASI KEUANGAN				Fisik
					TARGET	%	REALISASI	%	
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			60.229.063.944	48.504.293.044	24.252.146.522	40,27	16.970.569.506	34,99	36,77
3.25.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		33.230.793.144	33.060.434.394	16.530.217.197	49,74	13.724.631.069	41,51	45,69
3.25.1.101	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.866.800.000	1.652.404.250	826.202.125	44,26	450.787.571	27,28	30,89
3.25.1.101.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		643.000.000	497.904.000	248.952.000	38,72	128.833.091	25,88	29,38
3.25.1.101.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		43.600.000	23.149.000	11.574.500	26,55	21.863.780	94,45	97,95
3.25.1.101.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		17.000.000	8.545.000	4.272.500	25,13	8.220.000	96,20	100,00
3.25.1.101.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		15.000.000	8.206.250	4.103.125	27,35	6.490.700	79,09	82,59
3.25.1.101.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD		14.900.000	8.216.000	4.108.000	27,57	2.935.000	35,72	39,22
3.25.1.101.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		617.000.000	617.000.000	308.500.000	50,00	125.000.000	20,26	23,43
3.25.1.101.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		516.300.000	489.384.000	244.692.000	47,39	157.445.000	32,17	35,67
3.25.1.102	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		19.072.244.394	19.072.244.394	9.536.122.197	50,00	10.474.995.310	54,92	54,92
3.25.1.102.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		18.079.604.394	18.079.604.394	9.039.802.197	50,00	10.196.195.310	56,40	56,40
3.25.1.102.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		905.400.000	905.400.000	452.700.000	50,00	240.700.000	26,58	30,08
3.25.1.102.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		30.240.000	30.240.000	15.120.000	50,00	9.640.000	31,88	35,38
3.25.1.102.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		20.000.000	20.000.000	10.000.000	50,00	8.140.000	40,70	44,20
3.25.1.102.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD		37.000.000	37.000.000	18.500.000	50,00	20.320.000	54,92	-
3.25.1.103	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		243.500.000	172.767.000	86.383.500	35,48	114.220.230	66,11	73,78
3.25.1.103.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD		17.000.000	17.000.000	8.500.000	50,00	13.010.000	76,53	80,03
3.25.1.103.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		60.000.000	60.000.000	30.000.000	50,00	6.945.750	11,58	15,08
3.25.1.103.3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD		25.000.000	25.000.000	12.500.000	50,00	24.520.000	98,08	100,00
3.25.1.103.4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		141.500.000	70.767.000	35.383.500	25,01	69.744.480	98,56	100,00
3.25.1.105	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		581.075.000	442.495.000	221.247.500	38,08	51.160.000	11,56	24,73
3.25.1.105.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		80.000.000	80.000.000	40.000.000	50,00	-	-	-
3.25.1.105.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		143.000.000	143.000.000	71.500.000	50,00	-	-	-
3.25.1.105.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		34.075.000	31.495.000	15.747.500	46,21	31.495.000	100,00	100,00
3.25.1.105.5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		52.000.000	52.000.000	26.000.000	50,00	14.935.000	28,72	31,72
3.25.1.105.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		72.000.000	36.000.000	18.000.000	25,00	4.730.000	13,14	16,64
3.25.1.105.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		200.000.000	100.000.000	50.000.000	25,00	-	-	-
3.25.1.106	Administrasi Umum Perangkat Daerah		4.453.817.743	4.307.167.743	2.153.583.872	48,35	1.449.335.783	33,65	48,65
3.25.1.106.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		22.707.600	22.707.600	11.353.800	50,00	18.610.300	81,96	85,46
3.25.1.106.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		20.000.000	20.000.000	10.000.000	50,00	2.998.000	14,99	17,99
3.25.1.106.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		50.000.000	50.000.000	25.000.000	50,00	12.866.000	25,73	29,23
3.25.1.106.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		3.123.510.143	3.123.510.143	1.561.755.072	50,00	876.136.800	28,05	31,55
3.25.1.106.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		320.000.000	320.000.000	160.000.000	50,00	82.132.338	25,67	29,17
3.25.1.106.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		400.000.000	400.000.000	200.000.000	50,00	315.070.000	78,77	82,27
3.25.1.106.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu		67.600.000	67.600.000	33.800.000	50,00	39.993.000	59,16	62,16
3.25.1.106.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		250.000.000	103.350.000	51.675.000	20,67	101.529.345	98,24	100,00
3.25.1.106.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		200.000.000	200.000.000	100.000.000	50,00	-	-	-

KODE REKENING	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU	PAGU PERUBAHAN	REALISASI KEUANGAN				Fisik
					TARGET	%	REALISASI	%	
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			60.229.063.944	48.504.293.044	24.252.146.522	40,27	16.970.569.506	34,99	36,77
3.25.1.107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1.007.500.000	1.007.500.000	503.750.000	50,00	-	-	-
3.25.1.107.5	Pengadaan Mebel		7.500.000	7.500.000	3.750.000	50,00	-	-	-
3.25.1.107.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		1.000.000.000	1.000.000.000	500.000.000	50,00	-	-	-
3.25.1.108	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.574.700.000	2.574.700.000	1.287.350.000	50,00	972.446.396	37,77	46,18
3.25.1.108.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		6.700.000	6.700.000	3.350.000	50,00	6.700.000	100,00	100,00
3.25.1.108.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		1.000.000.000	1.000.000.000	500.000.000	50,00	264.502.719	26,45	29,95
3.25.1.108.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		200.000.000	200.000.000	100.000.000	50,00	-	-	-
3.25.1.108.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		1.368.000.000	1.368.000.000	684.000.000	50,00	701.243.677	51,26	54,76
3.25.1.109	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		3.431.156.007	3.831.156.007	1.915.578.004	55,83	211.685.779	5,53	29,19
3.25.1.109.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		460.000.000	460.000.000	230.000.000	50,00	199.645.279	43,40	46,90
3.25.1.109.5	Pemeliharaan Mebel		19.985.336	19.985.336	9.992.668	50,00	8.624.500	43,15	46,65
3.25.1.109.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		17.325.000	17.325.000	8.662.500	50,00	3.416.000	19,72	23,22
3.25.1.109.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		2.933.845.671	3.333.845.671	1.666.922.836	56,82	-	-	-
3.25.2	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL		1.566.430.500	1.289.857.620	644.928.810	41,17	126.052.006	9,77	51,09
3.25.2.101	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		1.069.273.000	900.993.370	450.496.685	42,13	73.880.840	8,20	14,98
3.25.2.101.2	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat		89.800.000	56.095.000	28.047.500	31,23	23.600.000	42,07	45,57
3.25.2.101.3	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		148.926.000	103.976.000	51.988.000	34,91	10.280.000	9,89	13,39
3.25.2.101.4	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		200.000.000	177.446.000	88.723.000	44,36	11.530.000	6,50	10,00
3.25.2.101.5	Penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Dokumen Final RZWP-3		278.469.500	257.148.500	128.574.250	46,17	18.720.840	7,28	10,78
3.25.2.101.6	Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Materi Teknis Perairan Pesisir		67.077.500	45.075.370	22.537.685	33,60	9.750.000	21,63	25,13
3.25.2.101.9	Penyediaan Data dan Informasi Spasial Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Magrove di luar kawasan hutan		185.000.000	161.252.500	80.626.250	43,58	-	-	-
3.25.2.101.13	Pengintegrasian Materi Teknis Perairan Pesisir/RZWP-3K ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi		100.000.000	100.000.000	50.000.000	50,00	-	-	-
3.25.2.102	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi		67.157.500	36.578.750	18.289.375	27,23	27.339.726	74,74	78,24
3.25.2.102.7	Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan		67.157.500	36.578.750	18.289.375	27,23	27.339.726	74,74	78,24
3.25.2.103	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		430.000.000	352.285.500	176.142.750	40,96	24.831.440	7,05	8,96
3.25.2.103.1	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil		250.000.000	227.907.500	113.953.750	45,58	24.831.440	10,90	14,40
3.25.2.103.4	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan		130.000.000	74.378.000	37.189.000	28,61	-	-	-
3.25.2.103.6	Pelaksanaan Fasilitas Akses Kemitraan Usaha		50.000.000	50.000.000	25.000.000	50,00	-	-	-

KODE REKENING	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU	PAGU PERUBAHAN	REALISASI KEUANGAN				Fisik
					TARGET	%	REALISASI	%	
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			60.229.063.944	48.504.293.044	24.252.146.522	40,27	16.970.569.506	34,99	36,77
3.25.3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		16.979.264.700	8.345.812.230	4.172.906.115	24,58	1.271.200.153	15,23	28,86
3.25.3.101	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil		2.443.734.500	2.046.921.500	1.023.460.750	41,88	146.725.248	7,17	10,10
3.25.3.101.1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan		50.000.000	50.000.000	25.000.000	50,00	-	-	-
3.25.3.101.2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap		950.000.000	869.161.500	434.580.750	45,75	26.395.000	3,04	6,54
3.25.3.101.5	Pengadaan prasarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur		150.000.000	130.000.000	65.000.000	43,33	5.325.000	4,10	7,60
3.25.3.101.6	Pengelolaan data dan informasi terkait dengan penangkapan ikan terukur		185.000.000	165.425.500	82.712.750	44,71	-	-	3,50
3.25.3.101.7	Pengadaan sarana pendukung untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur		250.000.000	93.207.500	46.603.750	18,64	67.360.248	72,27	75,77
3.25.3.101.8	Penerbitan rekomendasi surat tanda penangkapan ikan andon/ Tanda Daftar Penangkapan Ikan		108.734.500	58.714.500	29.357.250	27,00	47.645.000	81,15	84,65
3.25.3.101.10	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap		750.000.000	680.412.500	340.206.250	45,36	-	-	-
3.25.3.102	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		190.725.000	130.672.500	65.336.250	34,26	106.736.500	81,68	98,85
3.25.3.102.1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan		150.000.000	110.310.000	55.155.000	36,77	87.556.500	79,37	100,00
3.25.3.102.4	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan		40.725.000	20.362.500	10.181.250	25,00	19.180.000	94,19	97,69
3.25.3.103	Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT		125.000.000	65.864.500	32.932.250	26,35	31.812.800	48,30	51,80
3.25.3.103.5	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan		125.000.000	65.864.500	32.932.250	26,35	31.812.800	48,30	51,80
3.25.3.105	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		65.810.000	35.690.000	17.845.000	27,12	21.441.200	60,08	63,58
3.25.3.105.3	Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 5 GT		65.810.000	35.690.000	17.845.000	27,12	21.441.200	60,08	63,58
3.25.3.106	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi		14.153.995.200	6.066.663.730	3.033.331.865	21,43	964.484.405	15,90	19,06
3.25.3.106.1	Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan		10.335.000.000	2.578.992.530	1.289.496.265	12,48	572.221.440	22,19	25,69
3.25.3.106.2	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan		1.400.000.000	1.322.050.000	661.025.000	47,22	216.956.466	16,41	19,91
3.25.3.106.3	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan		2.418.995.200	2.165.621.200	1.082.810.600	44,76	175.306.499	8,09	11,59
3.25.4	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA		4.267.721.600	3.952.740.800	1.976.370.400	46,31	1.478.993.657	37,42	41,23
3.25.4.101	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		50.000.000	28.185.000	14.092.500	28,19	20.000.000	70,96	74,46
3.25.4.101.3	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan		50.000.000	28.185.000	14.092.500	28,19	20.000.000	70,96	74,46
3.25.4.105	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut		1.502.721.600	1.324.334.800	662.167.400	44,06	1.241.326.000	93,73	95,66
3.25.4.105.2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut		27.879.800	13.939.900	6.969.950	25,00	9.660.000	69,30	73,30
3.25.4.105.4	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut		1.140.000.000	1.140.000.000	570.000.000	50,00	1.122.351.000	98,45	100,00
3.25.4.105.7	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi		100.000.000	50.000.000	25.000.000	25,00	34.605.000	69,21	72,71
3.25.4.105.11	Pengelola Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota		150.000.000	77.974.000	38.987.000	25,99	42.135.000	54,04	57,54
3.25.4.105.12	Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		84.841.800	42.420.900	21.210.450	25,00	32.575.000	76,79	80,29

KODE REKENING	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU	PAGU PERUBAHAN	REALISASI KEUANGAN				Fisik
					TARGET	%	REALISASI	%	
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			60.229.063.944	48.504.293.044	24.252.146.522	40,27	16.970.569.506	34,99	36,77
3.25.4.106	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat		2.715.000.000	2.600.221.000	1.300.110.500	47,89	217.667.657	8,37	10,95
3.25.4.106.3	Penyediaan Sarana Pembudidaya Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota		1.565.000.000	1.496.041.000	748.020.500	47,80	203.114.777	13,58	17,08
3.25.4.106.4	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota		1.150.000.000	1.104.180.000	552.090.000	48,01	14.552.880	1,32	4,82
3.25.5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN		2.830.834.000	879.461.000	439.730.500	15,53	160.788.620	18,28	18,20
3.25.5.101	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil		2.830.834.000	879.461.000	439.730.500	15,53	160.788.620	18,28	36,40
3.25.5.101.7	Penanganan perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di Wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi		125.000.000	91.930.000	45.965.000	36,77	30.792.600	33,50	37,00
3.25.5.101.8	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan		102.000.000	450.000.000	225.000.000	220,59	-	-	-
3.25.5.101.9	Penanganan perkara sanksi administrasi bidang kelautan dan perikanan izin provinsi		450.000.000	75.000.000	37.500.000	8,33	10.500.000	14,00	-
3.25.5.101.13	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai Kewenangan		33.024.000	16.512.000	8.256.000	25,00	13.020.000	78,85	82,35
3.25.5.101.14	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan Provinsi		134.000.000	76.248.000	38.124.000	28,45	52.896.020	69,37	72,87
3.25.5.101.16	Pengawasan Usaha Pemanfaatan daya kelautan kewenangan provinsi		100.000.000	63.611.000	31.805.500	31,81	8.110.000	12,75	16,25
3.25.5.101.17	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)		1.886.810.000	106.160.000	53.080.000	2,81	45.470.000	42,83	46,33
3.25.6	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN		1.354.020.000	975.987.000	487.993.500	36,04	208.904.001	21,40	23,85
3.25.6.102	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		617.080.000	378.925.000	189.462.500	30,70	146.044.001	38,54	36,22
3.25.6.102.3	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk di konsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing		412.040.000	211.845.000	105.922.500	25,71	146.044.001	68,94	72,44
3.25.6.102.4	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Strandar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar		205.040.000	167.080.000	83.540.000	40,74	-	-	-
3.25.6.103	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		736.940.000	597.062.000	298.531.000	40,51	62.860.000	10,53	11,47
3.25.6.103.1	Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		400.000.000	360.875.000	180.437.500	45,11	7.950.000	2,20	5,70
3.25.6.103.2	Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		300.000.000	217.717.000	108.858.500	36,29	54.910.000	25,22	28,72
3.25.6.103.4	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku		36.940.000	18.470.000	9.235.000	25,00	-	-	-

KODE REKENING	PROGRAM	KEGIATAN	PAGU	PAGU PERUBAHAN	REALISASI KEUANGAN				Fisik
					TARGET	%	REALISASI	%	
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			60.229.063.944	48.504.293.044	24.252.146.522	40,27	16.970.569.506	34,99	36,77
UPT. PBAPL Kumai (BLUD)			21.163.081.323	21.163.081.323	10.581.540.662	50,00	12.076.486.489	57,06	60,56
3.25.1	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN		21.163.081.323	21.163.081.323	10.581.540.662	50,00	12.076.486.489	57,06	60,56
3.25.1.110	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi		21.163.081.323	21.163.081.323	10.581.540.662	50,00	12.076.486.489	57,06	60,56
3.25.1.110.1	Peningkatan Pelayanan BLUD		21.163.081.323	21.163.081.323	10.581.540.662	50,00	12.076.486.489		60,56

Palangka Raya, Oktober 2025
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Kalimantan Tengah



SRI WIDIA MARNI, S.I.P., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196902121989112001



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Jalan Brigjen Katamso No. 2 Palangka Raya - Kalimantan Tengah 73112

Telp. (0536) 3220517/ 3229663

Website : www.dislutkan.kalteng.go.id

Email : dislutkan@kalteng.go.id